



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan presiden seperti tersebut diatas adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi perangkat daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih



dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung (Bappeda) Kota Bandung adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan daerah lingkup Kota Bandung. Pembentukan Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1981 dan Perda Nomor 24 Tahun 1981. Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Tingkat Kota Bandung, yang mengubah nama Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi Bappeda Kota Bandung. Perubahan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Bappeda kembali mengalami perubahan sesuai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung. Selanjutnya berubah kembali dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengubah nama Bappeda Kota Bandung menjadi Bappelitbang Kota Bandung.



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1402 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program.
3. Kepala Bidang Analisis Pembangunan Daerah, Perencanaan Program, Data, Evaluasi dan Pelaporan, yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bidang I Analisis Pembangunan Daerah dan Perencanaan Program;
 - b. Kepala Sub Bidang II Pengendalian dan Evaluasi;
 - c. Kepala Sub Bidang III Data, Informasi dan Pelaporan.
4. Kepala Bidang I Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan I;
 - b. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan II;
 - c. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan III.
5. Kepala Bidang II Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan SDA, yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumberdaya Keuangan dan Sumber Daya Alam I;
 - b. Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumberdaya Keuangan dan Sumber Daya Alam II;
 - c. Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumberdaya Keuangan dan Sumber Daya Alam III.
6. Kepala Bidang III Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, yang membawahi:



- a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I;
 - b. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II;
 - c. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III.
7. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang membawahi:
- a. Kepala Sub Bidang I Sosial dan Pemerintahan;
 - b. Kepala Sub Bidang II Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Kepala Sub Bidang III Inovasi dan Teknologi.
8. Jabatan Pelaksana dan Fungsional.

C. Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Bappelitbang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan kebijakan teknis lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

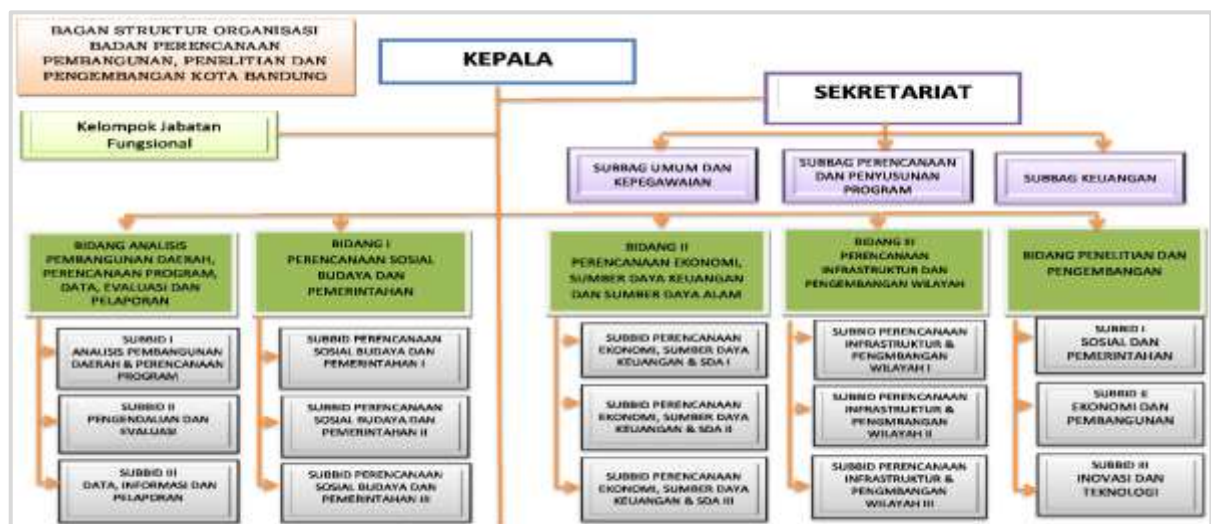
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Bappelitbang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1402 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Bappelitbang dipimpin oleh dua orang Kepala Badan dikarenakan terjadi pergantian kepemimpinan dengan uraian sebagai berikut:

1. Periode Januari s.d 22 Maret 2019 oleh HERY ANTASARI, ST, M.Dev.Plg;
2. Periode 23 Maret s.d sekarang adalah oleh dr. AHYANI RAKSANAGARA, M.Kes

Kedua pimpinan di atas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



D. Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 - 2023.

E. Sistematika

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah Reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

1.1 Perencanaan Strategis

A. Rencana Strategi

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil reviu atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bappelitbang Kota Bandung Nomor 050/1395 – Sekret Bapp Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2019-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga dokumen Renstra



Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018 - 2023, yaitu:

**“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG
YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”**

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bandung** : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang.
- Unggul** : Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik disetiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan *SDM* Kota Bandung yang *berkualitas baik secara fisik dan mental* akan



berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.

Nyaman : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan.

Sejahtera : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Agamis : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari



kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing

Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.

Pencapaian misi 1 didukung oleh tujuan dan sasaran yang dapat dilihat pencapaiannya dari indikator kinerja. Adapun tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang mendukung misi 1 dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing adalah membangun masyarakat Kota Bandung yang mandiri dengan jaminan pendidikan, kesehatan yang bermutu, adil dan merata berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia.

B. Sasaran



Dalam rangka pencapaian tujuan dari misi 1 di atas, maka dapat dilihat dari uraian sasaran strategis dibawah ini:

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat di Kota Bandung adalah Harapan Lama Sekolah, Angka Kelulusan, Rata-rata Nilai Hasil Ujian SD dan Rata-rata Nilai Hasil Ujian SMP.

2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah Umur Harapan Hidup.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih

Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima.

Pencapaian misi 2 didukung oleh tujuan dan sasaran yang dapat dilihat pencapaiannya dari indikator kinerja. Adapun tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang mendukung misi 2 dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan melayani adalah terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.

B. Sasaran

Dalam rangka pencapaian tujuan dari misi 2 di atas, maka dapat dilihat dari uraian sasaran strategis dibawah ini:

1. Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi adalah Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Indeks Kepuasan Baik, Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota, Nilai LPPD Kota, dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah



Daerah.

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas pelayanan public adalah Level Kematangan Smart City Kota Bandung.

3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan

Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal

Pencapaian misi 3 didukung oleh tujuan dan sasaran dapat dilihat pencapaiannya dari indikator kinerja. Adapun tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang mendukung misi 3 dijelaskan sebagai berikut:

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan, yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini Kota Bandung.

B. Sasaran

Dalam rangka pencapaian tujuan dari misi 3 di atas, maka dapat dilihat dari uraian sasaran strategis dibawah ini:

1. Meningkatnya Perekonomian Kota

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya perekonomian kota adalah PDRB Perkapita, Indeks Daya Saing Pariwisata dan Pengeluaran Perkapita.

2. Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait menurunnya jumlah penduduk miskin adalah Angka Kemiskinan.

3. Meningkatnya Kesempatan Kerja

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kesempatan kerja adalah Tingkat Pengangguran Terbuka.



4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan

Pencapaian misi 4 didukung oleh tujuan dan sasaran yang dapat dilihat pencapaiannya dari indikator kinerja. Adapun tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang mendukung misi 4 dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan adalah terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan, yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian indikator kinerja Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Kota Bandung.

B. Sasaran

Dalam rangka pencapaian tujuan dari misi 4 di atas, maka dapat dilihat dari uraian sasaran strategis dibawah ini:

1. Meningkatnya Ruang Kota yang Nyaman dan Berkelanjutan

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan adalah Persentase RTH

2. Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkualitas adalah Lama Genangan yang tertangani pada Titik Genangan, Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan, dan Persentase Luasan Kawasan Kumuh.

3. Meningkatnya Layanan Air Bersih



Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya layanan air bersih adalah Cakupan Layanan Air Bersih.

4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota.

5. Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota melalui pembiayaan inovatif dan terintegrasi dengan melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, BUMN/ BUMD, Swasta dan Masyarakat.

Pencapaian misi 5 didukung oleh tujuan dan sasaran yang dapat dilihat pencapaiannya dari indikator kinerja. Adapun tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang mendukung misi 5 dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi adalah optimalisasi partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan, yang dapat dilihat atau diukur dari indikator kinerja tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan.

B. Sasaran

Dalam rangka pencapaian tujuan dari misi 5 di atas, maka dapat dilihat dari uraian sasaran strategis dibawah ini:

1. Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meingkatnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan adalah Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan



2. Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Swasta dalam Pembangunan

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan adalah Persentase Realisasi Program/Agenda Prioritas Pembangunan yang dibiayai dari TJSL dan Sumbangan Pihak Ketiga dan Persentase Realisasi Program/Agenda Prioritas Pembangunan yang dibiayai dari Swasta.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan pencapaian cita-cita tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran serta indikator dan target Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Bappelitbang Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas dan Implementasi	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	25,57	25,73	25,89	26,05	26,21



	Perencanaan Pembangunan							
		Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	20,01	20,06	20,11	20,16	20,21	
		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	72	76	80	84	88
	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100	100	100	100	100	
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappelitbang	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappelitbang	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,17	78,42	78,67	78,92	79,17

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Perangkat Daerah melalui Keputusan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung Nomor :188.4/1364-Sekret Bapp, tanggal 18 April Tahun 2019



tentang Indikator Kinerja Utama Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2019.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2019

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI
1	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	Perencanaan Kinerja dengan Bobot (30%) terdiri dari :A. Rencana Strategis (10%)- Pemenuhan (2%)- Kualitas (5%)- Implementasi (3%)B. Rencana Kinerja Tahunan (20%)- Pemenuhan (4%)- Kualitas (10%)- Implementasi (6%)Nilai Komponen Perencanaan Kinerja :A + B
2	Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	Pengukuran Kinerja dengan Bobot (25%) terdiri dari :- Pemenuhan (5%)- Kualitas (12,5%)- Implementasi (7,5%)
3	Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	Jumlah Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target / Jumlah Seluruh Indikator x 100%
4	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	Jumlah dokumen kajian yang direkomendasikan sebagai dasar kebijakan / jumlah seluruh dokumen kajian x 100%
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{NRR per Responden} = \frac{\text{Jumlah Nilai Responden}}{\text{Jumlah Responden}}$ $\text{NRR tertimbang per unsur} = \frac{\text{NRR per Responden}}{12}$ $\text{Nilai indeks} = \frac{\text{Jumlah NRR tertimbang per unsur}}{4}$ $\text{IKM Pelayanan} = \text{Nilai Indeks} \times (100\% : 4 \text{ indeks})$

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari rencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan



oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	Poin	25,57
		Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	Poin	20,01
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	%	72
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	%	100



4.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappelitbang	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	78,17
----	-------------------------------------------------	----------------------------	--------	-------

D. Perencanaan Anggaran Tahun 2019

Dari sebanyak 4 (empat) Sasaran dengan indikator yang diperjanjikan didukung oleh jumlah Program sebanyak 9 (sembilan) yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar Rp. 15.715.177.794,

Tabel 2.4
Anggaran Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Program yang Terkait langsung dengan Sasaran	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2019
1	Sasaran 1	3	5.874.286.102
2	Sasaran 2	2	986.800.000
3	Sasaran 3	1	2.588.841.260
4	Sasaran 4	3	6.283.250.332
	Jumlah	9	15.715.177.794



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/pemberi amanah. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019 maupun Renja Perubahan Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara

LKIP Bappelitbang Kota Bandung Tahun Anggaran 2019



penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019 maupun Renja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Perangkat Daerah melalui Keputusan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung Nomor : 188.4/1364-Sekret Bapp, tanggal 18 April 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut :



Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan
Kota Bandung Tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	25,57	25,57	100.00
		Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	20,01	20,01	100.00
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	72	80	111.11
3	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100	100	100.00
4	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappelitbang	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,17	79,72	101,98

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2019 seluruhnya tercapai dan melebihi target.

Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan, dengan capaian kinerja triwulan 111.11 % dan indikator IKM dengan capaian kinerja sebesar 101,98%.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan



kebijakan, dan Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja, dengan capaian kinerja triwulan masing – masing adalah 100 %

B. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2019

Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2019-2023 sebanyak 4 sasaran.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan, dari sebanyak 4 sasaran strategis dengan sebanyak 5 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	25,57	25,57	100.00
		Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	20,01	20,01	100.00
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	72	80	111.11
3	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan	100	100	100.00



	dalam Pembangunan Daerah	sebagai dasar perumusan kebijakan			
4	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappelitbang	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,17	79,72	101,98

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Badan pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.3**Pencapaian Kinerja Sasaran****Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	40.00 %
2	Sesuai Target	60.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 4 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4**Pencapaian target Misi**

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	5	2	40.00	3	60.00	0	0.00
	Jumlah	5	2	40.00	3	60.00	0	0.00



Dari sebanyak 4 sasaran dengan sebanyak 5 indikator kinerja, pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	5	
1	Melebihi/Melampaui Target	2	40.00 %
2	Sesuai Target	3	60.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung tahun 2018-2023,



analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

**Sasaran 1**

Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1 Tahun 2019
Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	Poin	25.57	25.57	100	-	-	0	-	-	0	-	-	0
2	Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	Poin	20.01	20.01	100	-	-	0	-	-	0	-	-	0

Analisis pencapaian sasaran **Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan** :

Berdasarkan Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 31 Desember 2018 Nomor : B/122/AA.05/2018 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung memperoleh predikat nilai A dengan nilai seluruh komponen sebesar 80,05. Adapun untuk Komponen Perencanaan Kinerja mengalami kenaikan yang sebelumnya berada pada angka 25,41 kini menjadi 25,57 atau mengalami kenaikan sebesar 0,16 poin. sedangkan untuk komponen Pengukuran Kinerja juga mengalami kenaikan dimana pada tahun sebelumnya berada pada angka 19,96 kini menjadi 20,01 atau mengalami kenaikan sebesar 0.05 poin.

Beberapa Faktor Pendukung pencapaian target kinerja pada komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja di antaranya : 1. Pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan Integrasi Sistem Perencanaan Kinerja, Sistem Penganggaran dan Informasi Kinerja (*Performance Based Budgeting*) dalam satu aplikasi terintegrasi untuk memastikan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran; 2. LKIP Bappelitbang Kota Bandung Tahun Anggaran 2019



Pemerintah Kota Bandung telah membangun Sistem Penilaian Kinerja Individu yang diselaraskan dengan ukuran kinerja organisasi, untuk memastikan setiap individu memiliki manfaat dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi; 3. Pemerintah Kota Bandung telah memiliki Metode Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja, untuk memastikan Validitas Data Kinerja.

Selain beberapa Faktor Pendukung, dalam pelaksanaannya juga masih ditemukan hambatan-hambatan dalam rangka pencapaian target SAKIP khususnya pada komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja. beberapa hambatan tersebut dapat terlihat dari beberapa rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB sebagai berikut : 1. Belum efektifnya keberadaan organisasi/perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bandung karena belum diterapkannya *Performance Based Organization* dengan menjadikan RPJMD Kota Bandung sebagai Acuan; 2. Belum baiknya Kualitas Evaluasi Program; 3. Penerapan Budaya Kinerja belum optimal seiring dengan belum sepenuhnya Indikator Kinerja Individu memiliki dampak langsung terhadap perbaikan Kinerja Organisasi.

Adapun rencana perbaikan atas tindaklanjut rekomendasi tersebut, tentunya akan dilakukan segera dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka percepatan perbaikan Manajemen Kinerja di Pemerintah Kota Bandung, diantaranya Penerapan *Perfomanced Based Organization* seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi - Jawa Timur, Meningkatkan Kualitas Evaluasi Program dengan melibatkan Asisten Daerah sebagai Koordinator dan Pengoptimalan Sistem Monitoring dan Evaluasi khususnya pada tingkat pencapaian Program, serta segera mempercepat Budaya Kinerja yang Efektif, Efisien dan Selaras dalam pencapaian Kinerja Organisasi.

**Sasaran 2****Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan**

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7**Analisis Pencapaian Sasaran 2 Tahun 2019****Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	%	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	72	80	111,11

Analisis pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa hasil evaluasi dokumen rencana periode sebelumnya memberikan gambaran tentang hasil pencapaian kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dalam dokumen rencana periode sebelumnya, baik kinerja tahunan (RKPD), kinerja jangka menengah (RPJMD) maupun kinerja jangka panjang (RPJPD) untuk menjamin kesinambungan dengan rencana pembangunan yang disusun. Evaluasi terdiri dari

1. Evaluasi Terhadap Hasil RPJPD dan RPJMD;
2. Evaluasi Hasil RPJPD dan RPJMD diperoleh dari hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD dan RPJMD;
3. Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan RKPD;

Terdapat tiga (3) hal utama dalam melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD yaitu: 1) Evaluasi kinerja RKPD tahun lalu; 2) Review capaian kinerja RPJMD; dan 3) Evaluasi capaian pelaksanaan RKPD sampai tahun berjalan.



4. Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai dengan tahun berjalan

Kegiatan review ini menggunakan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD yang bersumber dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD), atau dokumen khusus hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu serta tahun-tahun sebelumnya pada periode RPJMD dikompilasikan sehingga dapat diperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target RPJMD, sebagai bahan pertimbangan arah kebijakan, misalnya bidang-bidang urusan pemerintahan apa saja yang perlu dipacu perkembangannya dan yang perlu dipertahankan kinerjanya.

Target sasaran Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan yang tercantum dalam Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2019 adalah sebesar 72%. Berdasarkan Surat Kepala Bappelitbang Kota Bandung Nomor PN.10.06/0019.1-Bappelitbang tanggal 6 Januari 2020 tentang Laporan Realisasi IKU Bappelitbang Tahun 2019, tercantum bahwa realisasi IKU Bappelitbang dengan indikator Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan adalah sebesar 80% dengan target sasaran RPJMD sebanyak 25 indikator sasaran, tercapai sebanyak 20 indikator sasaran. Indikator sasaran RPJMD yang tidak tercapai adalah :

1. Rata - rata Nilai Ujian SD.

Indikator ini memiliki target sebesar 76,74 dan pada akhir triwulan terealisasi sebesar 66,70.

2. Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM Baik (min 83)

Indikator ini memiliki target sebesar 60 dan pada akhir triwulan IV terealisasi sebesar 40.

3. Persentase RTH.

Indikator ini memiliki target sebesar 12,4% dan pada akhir triwulan IV terealisasi sebesar 12,2 %.

4. Persentase Realisasi Program/agenda prioritas pembangunan yang dibiayai swasta (akumulasi)

Indikator ini memiliki target sebesar 33,33% dan pada akhir triwulan IV nilai



realisasinya adalah 0%.

5. Nilai Evaluasi AKIP Kota

Indikator ini memiliki target nilai A dan pada akhir triwulan IV nilai realisasinya adalah BB

Tabel 3.8
Capaian Target IKU Persentase Indikator RPJMD
Tercapai Atau Melebihi Target Tahunan

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian Kinerja (%)	Ket.
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14	14,18	101,29	Tercapai
		Angka Kelulusan	Persentase	100	100	100	Tercapai
		Rata-rata Nilai Ujian SD	Angka	76,74	66,7	86,92	Tidak Tercapai
		Rata-rata Nilai Ujian SMP	Angka	57,03	62,21	109,08	Tercapai
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,9	74	100,14	Tercapai
2	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik	Persentase	60	40,00	66,67	Tidak Tercapai
		Nilai Evaluasi AKIP Kota	Predikat	A	BB	97,49	Tidak Tercapai
		Nilai LPPD Kota	Predikat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100	Tercapai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Predikat	WTP	WTP	100	Tercapai
		Level Kematangan Smart City Kota Bandung	Tingkat	Integrative	Integrative	100	Tercapai
3	Meningkatnya Perekonomian Kota	PDRB Per Kapita (Konstan)	Juta (Rp)	70,73	73,92	104,51	Tercapai
		Indeks <i>Brand Awareness</i> Pariwisata Kota Bandung	Poin	3,46	3,52	98,56	Tercapai
		Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rp/Org	16.370	16.630	101,59	Tercapai
	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	8,39	8,01	104,74	Tercapai
	Menurunnya Jumlah	Angka Kemiskinan	Persentase	3,83	3,57	107,28	Tercapai

LKIP Bappelitbang Kota Bandung Tahun Anggaran 2019



	Penduduk Miskin						
4	Meningkatnya Ruang Kota yang Nyaman dan Berkelanjutan	Persentase RTH	Persentase	12,4	12,2	98,55	Tidak Tercapai
		Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan	Menit	100	63,3	157,98	Tercapai
	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan	Aspek	11	11	100	Tercapai
		Persentase Luasan Kawasan Kumuh	Persentase	4,55	3,21	141,75	Tercapai
	Meningkatnya Layanan Air Bersih	Cakupan Layanan Air Bersih	Persentase	79,00	80,24	101,57	Tidak Tercapai
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	35,35	50,12	141,78	Tercapai
Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota		Persentase	98,00	97,99	99,99	Tercapai	
5	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan (Meningkat 2% dari tahun 2018 sebesar 193 Milyar Rupiah)	Milyar	196,86	283,19	143,85	Tercapai
		Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	Persentase Realisasi Program/ Agenda Prioritas Pembangunan yang Dibiayai dari TJSL dan Sumbangan Pihak Ketiga	Persentase	71,43	100	140,00
		Persentase Realisasi Program/ Agenda Prioritas Pembangunan yang Dibiayai dari Swasta (Akumulasi)	Persentase	33,33	0	0	Tidak Tercapai

Sumber : Hasil Monev Triwulan IV Tahun 2019 (diolah)

**Sasaran 3****Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah****Tabel 3.9****Analisis Pencapaian Sasaran 3 Tahun 2019****Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	%	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	100	100	100.00

Analisis pencapaian sasaran Meningkatkan Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa salah satu misi yang dibawa dalam setiap keltbangan adalah sebisa mungkin hasilnya berupa (iovas) yang dapat dimanfaatkan berbagai pemangku kepentingan untuk dijadikan dasar perumusan kebijakan.

Untuk dapat mengukur ketercapaian kinerja sasaran ini, dengan berpedoman kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka digunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah}} \times 100$$

Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah hasil-hasil kelitbangan (sesuai Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan) yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan.

Dengan formulasi pengukuran capaian kinerja kelitbangan di atas, maka dapat dihitung ketercapaian sasaran “Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah” sebesar 100% yang dirinci sebagai berikut :

$$\frac{13 \text{ dokumen kelitbangan yang ditindaklanjuti}}{13 \text{ dokumen kelitbangan dalam renja perangkat daerah}} \times 100$$



Tabel 3.11

Capaian target IKU persentase hasil kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan.

No	Judul Penelitian / Kajian dan Pelaksana Kajian	Tindak Lanjut
1	Kajian Strategis Indikator Kemiskinan Kota Bandung Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bappelitbang Kota Bandung Kerjasama dengan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran	Sebagai data dukung dalam Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Bandung, dan sebagai masukan bagi TKPK Kota Bandung
2	Penelitian Faktor Lingkungan yang Berpotensi Menimbulkan Penyakit Luar Biasa (KLB) di Kota Bandung Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bappelitbang Kota Bandung Kerjasama dengan <i>Center for Economics and Development Studies (CEDS)</i> Universitas Padjadjaran	Sebagai bahan rekomendasi kebijakan upaya pencegahan penyakit KLB yang disebabkan oleh faktor lingkungan.
3	Kajian Tata Kelola Satuan Perlindungan Masyarakat di Kota Bandung Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bappelitbang Kota Bandung	Sudah disampaikan ke Satpol PP, sebagai bahan rekomendasi tentang Tata Kelola Satlinmas bagi Satpol PP, dan perbaikan Perwal No 1556 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
4	Penelitian Mandiri Lingkup Sosial dan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bappelitbang Kota Bandung	Sebagai bahan perumusan kebijakan dan perencanaan Bidang Sosbudpem serta Perencanaan di Kewilayahan terkait peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat
5	Penyusunan Buku Investasi Kota Bandung Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bappelitbang Kota Bandung	Sebagai bahan strategi tindak lanjut dalam pencapaian Misi 5 RPJMD Kota Bandung, dan telah dikoordinasikan kepada BPKA, DPMPSTP, Bag. Perekonomian serta Perangkat Daerah Lainnya



No	Judul Penelitian / Kajian dan Pelaksana Kajian	Tindak Lanjut
6	Kajian Sebaran Ideal Titik Reklame dan Standarisasi Sarana dan Prasarana Reklame di Kota Bandung	Sebagai bahan penyusunan Peraturan Walikota Bandung Nomor 005 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame Perwal, dalam mekanisme standardisasi reklame untuk meningkatkan implementasi pengelolaan reklame di Kota Bandung
7	Kajian Perumusan Model Kerjasama Pembangunan Daerah Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota Bandung	Sebagai dasar penyusunan SOP pada Bagian Kerjasama terkait pemetaan potensi kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Bandung di setiap sektor pembangunan daerah dan bentuk dan mekanisme kelembagaan yang sesuai dan optimal untuk mendukung terwujudnya keselarasan pembangunan dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Bandung.
8	Pelaksanaan Event ICONIC Kota Bandung	sesuai amanat PP 38/2017 tentang Inovasi Daerah, Event ICONIC sebagai sarana melakukan evaluasi dan verifikasi inovasi daerah dengan melibatkan unsur penta helix, kegiatan ini ditindak lanjuti dengan implementasi dan kajian teknis usulan inovasi dari masyarakat, antara lain : <ol style="list-style-type: none">1. kampanye angkot SAREDONA dan Road Safety dengan melibatkan Kuburan Band2. rencana kerjasama pengembangan inovasi Digital Library dengan



No	Judul Penelitian / Kajian dan Pelaksana Kajian	Tindak Lanjut
		melibatkan kalangan dunia usaha (Intel Company) 3. rencana kerjasama inovasi aktivasi co working space dengan melibatkan Bandung Inniciative Movement dan Google Indonesia
9	Kajian Fasilitas Keuangan Bagi Kepala Daerah Kota Bandung Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bappelitbang Kota Bandung	Rekomendasi Hasil Kajian sudah disampaikan ke BPKA dan sudah ditindaklanjuti dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor : 090 / Kep.581-BPKA/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Standarisasi Harga Tertinggi Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2019.
10	Kajian Potensi Daya Saing Komoditi Ekspor Kota Bandung Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bappelitbang Kota Bandung bekerjasama dengan Pusat Studi Pengembangan Bisnis, Kebijakan dan Kelembagaan – Universitas Padjadjaran.	Sebagai bahan rekomendasi kebijakan upaya peningkatan daya saing produk industri kecil menengah (IKM) berorientasi ekspor di Kota Bandung.
11	Penelitian Ketahanan Ekonomi Kota Bandung. Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bappelitbang Kota Bandung bekerjasama dengan Laboratorium Quality Control Departemen Statistika Unversitas Padjadjaran	Sudah Disampaikan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai bahan dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam ketahanan ekonomi kewilayahan di kota Bandung.
12	Dampak Implementasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Terhadap Perkembangan Usaha Industri di Kota Bandung Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bappelitbang Kota Bandung bekerjasama dengan Pusat Studi Pengembangan Bisnis, Kebijakan dan Kelembagaan – Universitas Padjadjaran.	Sudah disampaikan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan, bagaimana kebijakan untuk meningkatkan kinerja ekspor para pelaku usaha industri di Kota Bandung.



No	Judul Penelitian / Kajian dan Pelaksana Kajian	Tindak Lanjut
13	Penelitian Mandiri Lingkup Ekonomi dan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bappelitbang Kota Bandung	Sebagai bahan perumusan kebijakan dan perencanaan Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah serta masukan dalam penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum khususnya dalam pemanfaatan hasil penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan
	JUMLAH KAJIAN KELITBANGAN	13
	JUMLAH KAJIAN YANG DITINDAKLANJUTI	13
	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	(13 / 13) x 100 % = 100 %

**Sasaran 4**

Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappelitbang

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Sasaran 4 Tahun 2019
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappelitbang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	-	-	0.00	-	-	0.00	78.17	79.72	101.98	-	-	0.00

Analisis pencapaian sasaran Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Bappelitbang

Berdasarkan Permenpan No 14 Tahun 2017 Tentang Survey Kepuasan Masyarakat , pada pasal Pasal 4 disebutkan bahwa Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang selanjutnya ditetapkan sebagai indikator sasaran Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Bappelitbang.

Sasaran pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah :

- mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan;
- mendorong penyelenggaraan pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
- Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Unsur Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini meliputi :



1. Persyaratan
2. Sistem,, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan, pengaduan, saran dan masukan
9. Sarana dan prasarana

Pada Tahun 2019, IKU Bappelitbang mengenai IKM ditargetkan sebesar 78,17 point pada triwulan III dan **tercapai sebesar 79,72 point atau melebihi target yang ditetapkan**. Angka 79,72 point ini menunjukkan kinerja Bappelitbang termasuk kategori bagus dengan mutu pelayanan B. IKM ini diperoleh dari hasil survey terhadap pelanggan/pengguna layanan Bappelitbang. Adapun rincian data IKM Bappelitbang adalah sebagai berikut :

NO. RESP	NILAI PER UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	1	2	2	2	2	0	0	2	2
2	1	2	2	2	3	0	0	2	2
3	2	2	2	2	3	0	0	2	2
4	2	2	2	2	3	0	0	2	2
5	2	3	2	2	3	0	0	2	3
6	2	3	2	2	3	0	0	3	3
7	3	3	2	2	3	1	0	3	3
8	3	3	3	2	3	2	0	3	3
9	3	3	3	2	3	2	0	3	3
10	3	3	3	3	3	2	0	3	3
11	3	3	3	3	3	3	0	3	3
12	3	3	3	3	3	3	0	3	3
13	3	3	3	3	3	3	1	3	3
14	3	3	3	3	3	3	1	3	3

LKIP Bappelitbang Kota Bandung Tahun Anggaran 2019



15	3	3	3	3	3	3	2	3	3
16	3	3	3	3	3	3	2	3	3
17	3	3	3	3	3	3	2	3	3
18	3	3	3	3	3	3	2	3	3
19	3	3	3	3	3	3	2	3	3
20	3	3	3	3	3	3	2	3	3
21	3	3	3	3	3	3	2	3	3
22	3	3	3	3	3	3	2	3	3
23	3	3	3	3	3	3	2	3	3
24	3	3	3	3	3	3	2	3	3
25	3	3	3	3	3	3	2	3	3
26	3	3	3	3	3	3	2	3	3
27	3	3	3	3	3	3	2	3	3
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3
NO. RESP	NILAI PER UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3



43	3	3	3	3	3	3	3	3	3
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3



73	3	3	3	3	3	3	3	3	3
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3
87	3	2	2	3	3	3	3	3	3
NO. RESP	NILAI PER UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
88	2	3	3	3	3	3	4	3	3
89	3	3	3	3	3	3	3	3	3
90	3	4	3	2	3	3	3	3	4
91	3	4	3	3	3	4	4	3	3
92	3	3	3	3	3	3	3	3	3
93	3	3	3	4	4	4	3	3	3
94	3	3	3	4	3	3	3	3	3
95	3	3	3	4	4	3	3	3	3
96	4	4	4	3	4	3	3	4	4
97	3	3	4	3	3	3	4	4	4
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3
99	3	4	3	3	3	3	3	3	3
100	3	3	2	3	4	3	3	2	3



101	3	3	3	3	4	3	3	4	3
102	3	3	3	3	4	3	3	4	3
103	3	3	3	3	4	3	3	4	3
104	3	3	3	3	4	3	3	4	4
105	3	3	3	3	4	3	3	4	4
105	3	3	3	3	4	3	3	4	4
106	3	3	3	3	4	3	4	4	4
107	3	3	4	3	4	3	4	4	4
108	3	3	4	3	4	3	4	4	4
109	3	3	4	3	4	3	4	4	4
110	3	3	4	3	4	3	4	4	4
111	3	3	4	3	4	3	4	4	4
112	3	3	4	3	4	3	4	4	4
113	3	3	4	3	4	3	4	4	4
114	3	3	4	3	4	3	4	4	4
115	4	3	4	3	4	3	4	4	4
116	4	3	4	3	4	4	4	4	4
117	4	3	4	3	4	4	4	4	4
118	4	3	4	3	4	4	4	4	4
119	4	3	4	3	4	4	4	4	4
120	4	3	4	3	4	4	4	4	4
121	4	3	4	3	4	4	4	4	4
122	4	3	4	3	4	4	4	4	4
123	4	3	4	4	4	4	4	4	4
124	4	4	4	4	4	4	4	4	4
125	4	4	4	4	4	4	4	4	4
126	4	4	4	4	4	4	4	4	4
127	4	4	4	4	4	4	4	4	4
128	4	4	4	4	4	4	4	4	4
129	4	4	4	4	4	4	4	4	4



130	4	4	4	4	4	4	4	4	4
131	4	4	4	4	4	4	4	4	4
132	4	4	4	4	4	4	4	4	4
133	4	4	4	4	4	4	4	4	4
134	3	3	3	3	4	3	3	4	3
135	4	4	4	4	4	4	4	4	4
NO. RESP	NILAI PER UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
136	4	4	4	4	4	4	4	4	4
137	4	4	4	4	4	4	4	4	4
138	4	4	4	4	4	4	4	4	4
139	4	4	4	4	4	4	4	4	4
140	4	4	4	4	4	4	4	4	4
141	4	4	4	4	4	4	4	4	4
142	4	4	4	4	4	4	4	4	4
143	4	4	4	4	4	4	4	4	4
144	4	4	4	4	4	4	4	4	4
145	4	4	4	4	4	4	4	4	4
146	4	4	4	4	4	4	4	4	4
147	4	4	4	4	4	4	4	4	4
148	4	4	4	4	4	4	4	4	4
149	4	4	4	4	4	4	4	4	4
150	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Jumlah Nilai Per Unsur	477	472	486	468	506	461	441	501	493
NRR Per Unsur	3.18	3.15	3.24	3.12	3.37	3.07	2.94	3.34	3.29
NRR Tertimbang Per Unsur	0.35	0.35	0.36	0.35	0.37	0.34	0.33	0.37	0.37
Nilai Indeks	3.19								



IKM Unit Pelayanan	79.72
Mutu Pelayanan	B
Kinerja Unit Pelayanan	BAIK

Sumber: Data hasil olah Bappelitbang, 2019.



BAB IV PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung ini merupakan bentuk monitoring terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani di Tahun 2019 dan merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung 2019. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan 4 Tahun 2019 ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Capaian Kinerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung ini dapat menggambarkan kinerja Kami selaku penerima amanah dari pemberi amanah (Kepala Daerah) dan sekaligus sebagai bahan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja program/kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2019, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 4 (empat) sasaran dengan menetapkan 5 (lima) indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Dari 5 (lima) indikator kinerja sasaran yang diukur dengan hasil sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 111,11 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 101.98 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 111,11 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %



- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 101.98 %

Dengan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja kami selaku penerima amanah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Kota Bandung, 20 Januari 2020

KEPALA BAPPELITBANG,

Dr. AHYANI RAKSANAGARA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620713 198803 2 006